Gorontalo
Journal of Government and Political Studies
Volume 1 - NO. 2 - Oktober 2018
P-ISSN: 2614-2120 E-ISSN: 2614-2104

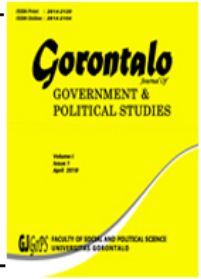

Menggali Pemahaman Pelajar Tentang Korupsi

Ratnaningsih Damayanti,
Fathur Rahman,
Muhtar Haboddin
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UniversitasBrawijaya
Jl Veteran, Malang, Jawa Timur, Telp. (0341) 575755, ext.121
Email:ratnaningsih@ub.ac.id

ABSTRACT

Understanding of corruption is not only task for KPK, government officials, and membersof Parliament. Public also needs tounderstand corruption as part of anti-corruption education. Students are one of the elements of society who need to gain an understanding of anti-corruption or integrity because of their early age. Research conducted by survey to students in Malang in certain limits managed to reveal students' understanding about corruption. This research presents an understanding of theoretical corruption and then looks at the extent to which respondents understand about corruption. Student's understanding and knowledge about corruption, corruption behavior, corruption-related actors to what was the most popular corruption case. In addition, the students also know about the institution authorized in conducting the act of corruption. However, for the respondents, the best institution in working to eradicate corruption is KPK. The results of this study also show that students 'understanding of corruption in Indonesia is related to students' obedience to school rules. The more students understand about corruption, the more obedient they are to schoolrules.

Keywords: *corruption; student integrity; malang.*

ABSTRAK

Memahami korupsi bukan hanya tugas KPK, pegawai pemerintah, dan anggota DPR. Masyarakat juga perlu memahami korupsi sebagai bagian dari pendidikan anti korupsi. Pelajar sebagai bagian dari masyarakat yang perlu memahami anti korupsi atau integritas sejak dini. Penelitian yang dilakukan melalui survey kepada pelajar di Kota Malang ini dalam batasan tertentu mampu mengungkapkan persepsi pelajar mengenai korupsi. Pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang korupsi, perilaku korupsi, dan aktor yang terjerat kasus korupsi yang paling populer. Bagi responden, institusi terbaik yang dapat memberantas korupsi adalah KPK. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pemahaman pelajar terhadap koruspi di Indonesia berhubungan dengan kepatuhan pelajar terhadap peraturan sekolah. Semakin pelajar memahami korupsi, semakin patuh mereka terhadap peraturan sekolah.

Kata kunci: korupsi; integritas pelajar; malang.

1. PENDAHULUAN

"Perjuangan melawan korupsi takpernah berhenti sedikitpun". Kalimat inilahyangmenjadijudullaporanKomisiPemberantasKorupsi(KPK)padatahun 2009. Kalimat ingin menegaskan kepada kita bahwa KPK memiliki komitmen yang besar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Komitmen dan perjuangan KPK untuk melawan perilaku tindak korupsi tentu bukan perkara mudah. Maklum yang menjadi sasaran tembak KPK adalah kepala daerah, politisi, birokrat, pengurus partai politik, polisi, jaksa, dan pengusaha. Semua actor ini, bukan saja memiliki kekuasaan dan pengaruh besar, tetapi juga memiliki jaringan yang solid untuk menghambat gerakan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Dengan kekuatan seperti ini, agak sulit kiranya KPK bisa melakukan pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, bahkan tantangan paling berat dihadapi oleh KPK dan penggiat korupsi saat ini adalah mereka yang paling lantang menyerukan pemberantasan korupsi adalah mereka yang tertuduh dan sudah divonis melakukan korupsi (Kompas, 3 Maret 2013). Suara para koruptor semacam ini sangat sulit untuk dimaknai; apakah suaranya merupakan dukungan yang tulus terhadap pemberantasan korupsi atau sekedar bersuara tanpa makna.

Terlepas dari semua itu, perjuangan melawan koruptor merupakan pekerjaan ekstra berat. Karena itu diperlukan kemauan politik semua *stakeholder* untuk melawan korupsi, sembari melakukan penyadaran secara *massive* kepada generasi muda. Penyadaran akan bahaya korupsi kepada generasi muda sangat diperlukan karena mereka merupakan tunas bangsa ini ke depan. Selain sebagai tunas bangsa, kaum muda atau generasi muda juga diyakini sebagai motor penggerak terjadi perubahan sosial dan politik. Pemahaman ini diperkuat sosiolog, Robert H Lauer (2013) yang menyebutkan generasi muda selain sebagai aktor yang mempelopori perubahan, juga memiliki keinginan untuk melibatkan diri dalam perubahan sosial dan politik. Sebagai ilustrasi pada tahun 1997-1998 generasi muda ikut serta dalam menumbangkan rezim Soeharto.

Menempatkan generasi muda sebagai pelopor perubahan dan memiliki keinginan untuk melibatkan diri dalam perubahan merupakan modal social yang bias digunakan dalam kerangka melawan perilaku korupsi yang sedang mewabah di Indonesia. Fakta bahwa korupsi sudah mewabah tidak bias disangkal oleh akal sehat. Karena itu generasi muda dalam hal ini siswa SMU/sederajat perlu ambil bagian dalam gerakan anti-korupsi. Keterlibatan para siswa SMU/sederajat diperlukan dalam gerakan anti-korupsi. Ikut terlibat dalam menyuarakan dampak dari perilaku korupsi merupakan panggilan sejarah. Pemahaman ini paralel dengan ungkapan Presiden Amerika Serikat, John F Kennedy yang mengatakan kepada kaum muda: "*apa yang bisa kau lakukan bagi bangsamu*".

Yang bisa dilakukan oleh siswa SMU terhadap bangsa ini adalah dengan melibatkan diri dari gerakan anti-korupsi. Hal ini bisa terjadi karena siswa SMU/sederajat *masa kini sudah mendapatkan* berbagai pengetahuan korupsi baik secara kultural maupun politik melalui pranata sosial baru yang bernama milis, blog, website, dan facebook (Sirimorok, 2010). Dengan jaringan teknologi komunikasi dan media sosial para siswa SMU/sederajat memiliki informasi dan pengetahuan mengenai persoalan korupsi yang sedang dirayakan oleh pejabat

publik, politisi, penegak hukum, birokrat, dan pengusaha.

Dengan segala informasi dan pengetahuan yang dimilikinya, para siswa SMU/sederajat, bias mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kalkukasi mereka. Misalnya, mereka bertindak untuk mengkampanyekan bahaya korupsi beserta implikasinya dalam kehidupan sosial-ekonomi, hukum, budaya, maupun politik-pemerintahan. Dari segi sosial-ekonomi, korupsi bias mensengsarakan masyarakat miskin. Ada banyak dana yang seharusnya diperuntukkan kepada masyarakat, tetapi dikorupsi oleh pejabat. Dari segi hukum, korupsi seharusnya mempertimbangkan hak asasi masyarakat terlanggar karena perilaku para koruptor (Kompas, 15 Mei 2015). Sementara dari segi budaya, korupsi merupakan kebiasaan dan kelaziman masyarakat kita dalam member dan menerima pemberian. (Widjoyanto dkk, 2010).
Sedangkan dari segi politik- pemerintahan, korupsi merupakan proses penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memperkaya diri, keluarga, dan kelompoknya (Haboddin dan Rahman 2013).

Implikasi negative dari perilaku korupsi tersebut, membuat sebagian pengamat berkesimpulan bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan. Menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa membutuh kandukungan bagi segenap elemen bangsa ini. Dukungan yang paling nyata yang bias dilakukan siswa SMU/sederajat tidak hanya menkampanyekan semangat anti-korupsi tetapi juga pentingnya pendidikan anti-korupsi melalui penanaman nilai-nilai kejujuran dan integritas. Alur pikir ini diperkuat Bambang Widjoyanto dkk (2010):

> *'sekolah masih diharapkan menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai anti- korupsi kepada anak didik sehingga sejak dini mereka memahami bahwa korupsi itu bertentangan dengan norma hukum dan agama. Selain itu, peserta anak didik juga memiliki komitmen akan nilai-nilai kejujuran,keadilan, dan kebenaran.*

Analisis di atas tidak hanya menyuntikkan perlunya komitmen moral dan agama bagi siswa SMU/sederajat, tetapi juga digenapi dengan penting menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nilai-nilai ini akan menopang pembangunan sosok generasi muda ke depan yang bermantabat, memiliki harga diri yang tinggi, dan berani berkata tidak untuk korupsi!

Untuk mendapatkan sosok generasi muda tersebut, maka penelitian ini sengaja dirancang untuk membedah bagaimana persepsi para siswa dalam memberikan penilaian mengenai korupsi dan apa implikasinya dalam kehidupan social kemasyarakatan. Selain itu, penilitian ini juga ingin mengetahui bagaimana pandangan parasiswa dalam memberikan tawaran solusinya mengenai persoalan korupsi ditanah air. Dengan pemahaman semacam ini, maka penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memotret suara generasi muda tentang korupsi. Memotret dan memberikan ruang bagi siswa SMU/sederajat untuk berpendapat mengenai korupsi dan dampaknya terhadap pertumbuhan demokrasi Indonesia ke depan. Persepsi dan suara kritis para siswa terhadap korupsi mempertegas eksistensi mereka bahwa yang muda sedang ikut bagian dalam pergulatan politik Indonesia kontemporer.

Atas penjelasan ini, maka sastrawan dan esais terkenal, Goenawan Muhamad mengatakan: *sejarah selalu menyediakan ruang bagi orang-orang muda*. Anak muda yang dimaksud adalah siswa SMU/sederajat yang memiliki

kekuatan moral dalam berjuang dan melawan korupsi. Sebab korupsi adalah perjuangan seumur hidup kata wartawan *kompas.*

Dalam jagat kepolitikan bangsa ini korupsi sudah hidup dan tumbuh sejak tahun lima-puluan. Hatta mencoba memahami persoalan korupsi sebagai persoalan budaya. Sementara pada sisi yang lain, korupsi dipahami sebagai perilaku menyimpang para pegawai dan pejabat dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh suatu masyarakat. Tujuan dari penyimpangan norma ini adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompoknya.

Pemaknaan korupsi diatas sesuai dengan Agus Dwiyanto dkk, yang mengatakan korupsi penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Karena itu yang termasuk dalam kategori korupsi bagi penyelenggaraan kekuasaan adalah sogokan, pemerasan, memperjual-belikan pengaruh, dan segala tindakan yang terkait didalamnya (Dwiyanto, 2003). Korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan personal atau keuntungan individual atau kelompok yang kepadanya seseorang berutang kepatuhan/kesetiaan (Isra, 2008).

Korupsi memiliki banyak definisi. Bahkan setiap bidang keilmuan memiliki definisi tersendiri dalam memahami korupsi. Sebagai ilustrasi, dari segi hukum, korupsi seharusnya mempertimbangkan hak asasi masyarakat terlanggar karena perilaku para koruptor (Kompas, 15 Mei 2015). Makna yang ingin disampaikan adalah korupsi berkaitan dengan pelanggaran hak. Seseorang yang melakukan korupsi sudah tentu merampas hak asasi seseorang. Sementara dari segi budaya, 'korupsi merupakan kebiasaan dan kelaziman masyarakat kita dalam memberi dan menerima pemberian. Karena itu, mentalitas korupsi menyatu dalam kepribadian masyarakat kita (Widjoyanto, dkk,2010).

Korupsi adalah kebiasaan dan kelaziman dalam masyarakat kita. Memberi kepada pejabat adalah sangat biasa terjadi dalam masyarakat kita. Sebaliknya, pejabat juga seringkali meminta upeti kepada masyarakatnya. Sejarawan, Ong Hok Ham (2002) menulis, 'dimasa lalu pungutan yang dilakukan seorang pejabat dianggap biasa. Para pejabat diberi kekuasaan untuk menarik upeti kepada rakyat. Menarik upeti dalam konteks tata-kelola pemerintahan masa kini bisa dikategorikan sebagai korupsi. Mengapa karena menarik atau meminta upeti kepada masyarakat termasuk dalam kategori penyalahgunaan kekuasaan. Pemahaman ini bisa dilihat dari kacamatan politik-pemerintahan. Dari segi politik-pemerintahan, korupsi merupakan proses penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memperkaya diri, keluarga, dan kelompoknya (Haboddin dan Rahman,2013).

Meminta upeti kepada masyarakat tidak dibenarkan dalam konstitusi. Bahkan, meminta upeti merupakan kegiatan penyalahgunaan kekuasaan dalam kerangka memperkaya diri. Motivasi pejabat atau pemilik kuasa dalam struktur pemerintahan melakukan korupsi bisa karena alasan kebutuhan atau alasan kerakusan. Korupsi bisa dilakukan karena faktor kebutuhan dan kerakusan. Tetapi,bilakitalihataktor-aktoryangterlibatdalamkorupsilebihdidominasioleh faktor keserakahan. Logikanya adalah yang melakukan korupsi itu adalah 'orang kaya' dan 'orang berada'. Bahkan, mereka hidup sudah terbilang mapan. Kendatipun demikian, para koruptor tersebut tidak pernah merasa 'cukup' dengan harta yang mereka miliki. Bahkan mereka selalui berpikir bahwa jabatan adalah sumber

penghasilan untuk memenuhi hasratnya. Hasrat manusia adalah memperkaya diri sendiri melalui optimalisasi penggunaankekuasaan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menurunkan kajian teoretik tentang korupsi ke dalam 13 indikator persepsi korupsi. Pertama definisi tentang korupsi. Kedua tujuan korupsi. Ketiga pelaku korupsi. Keempat penindak korupsi. Kelima pelaku korupsi. Keenam contoh tindakan korupsi. Ketujuh pendapat siswa tentang penindakan kasus korupsi. Kedelapan solusi pemberantasan korupsi. Kesembilan model kampanye anti korupsi. Kesepuluh informasi korupsi. Kesebelas pengetahuan tentang sogokan. Keduabelas pengetahuan tentang pemerasan. Ketiga belas adalah pengetahuan tentang penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan tinjauan literature tentang korupsi di atas, maka penelitian ini ingin menggali persepsi remaja khususnya siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kota Malang tentang korupsi. Persepsi korupsi di lingkungan siswa SMU/sederajat tentu sangat beraneka-ragam. Keanekaragaman persepsi tersebut bisa jadi karena perbedaan pemahaman akan korupsi. Persepsi tentang korupsi dari siswa SMU/sederajat akan berbeda dengan praktik korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Perbedaan-perbedaan persepsi tentang korupsi akan menghambat strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan bagian penggalian persepsi tentang korupsi sehingga dengan kesamaan persepsi tadi akan mendukung pemberantasan korupsi.

Tindakan korupsi seperti di paparkan pada penjelasan sebelumnya adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum. Artinya tindak korupsi adalah tindakan yang melangar aturan. Pada penelitian yang objeknya pelajar atau siswa ini, objek penelitian berada pada lingkungan sekolah. Pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai korupsi di Indonesia dalam penelitian ini akan di hubungkan dengan integritas siswa atau dengan kata lain adalah kepatuhan atau ketaatan siswa terhadap peraturan-peraturan sekolah. Indikator yang di pergunakan untuk menilai integritas siwa adalah butir-butirperaturan sekolah secara umum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Indikator integritas siswa yang dipergunakan adalah menguji beberapa tindakan negative bagi siswa. Pertama, mencontek waktu ujian. Kedua, melakukan kecurangan di kantin. Ketiga men*copy* tugas teman. Keempat membolos sekolah. Kelima merokok. Keenam minum minuman keras. Ketujuh mngkonsumsi narkoba. Kedelapan membohoni guru. Kesembilan membohongi orang tua.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Secara sederhana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang penyajian data dengan mempergunakan angka, grafik, tabel, dan diagram. Penelitian kuantitatif melakukan generalisasi pada objek penelitian, yaitu siswa SMU di Kota Malang. Penelitian ini menekankan pada keluasan informasi tentang persepsi siswa SMU mengenai korupsi dan kejujuran siswa.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian survey. Penelitian survei mencari tahu pada sejumlah besar orang tentang bagaimana tingkah laku mereka, opini mereka, apa yang mereka katakan, atau apakah yang mereka lakukan (Marczyk, et.al, 2005). Pendapat lain mengartikan penelitian survei

adalah penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan yang faktual, baik tentang situasi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok (Nazir,1988).

Dua pendapat di atas tentu saling menguatkan dalam memberikan pemaknaan mengenai penelitian survei. Penelitian survei dilakukan untuk mencari fakta, yaitu fakta mengenai persepsi siswa SMU mengenai korupsi di Indonesia. Dalam bahasa Lisa Harrison informasi yang diinginkan dalam penelitian survey adalah persepsi apa yang diketahui SMU/sederajat tentang korupsi (Harrisan, 2007). Artinya, pemahaman siswa SMU/Sederajat yang diketahui dalam memahami persoalan korupsi. Untuk mendapatkan persepsi siswa SMU/sederajat tentang korupsi, maka penelitian ini dilakukan secara serentak, menggunakan sampel sejumlah SMU/sederajat. Pemahaman ini diperkuat oleh Nazir yang mengatakan penelitian survey dilakukan dalam waktu yang bersamaan terhadap sejulah individu, baik secara sensus atau dengan menggunakan sampel (Nazir, *1988).*

Penelitian survei ini dilakukan untuk mencari informasi, bukan untuk menguji hipotesis. Survei dilakukan bukan untuk menghubungkan variabel walaupun data yang dihasilkan dapat dihubungkan.Walaupun penelitian survei ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis dan mencari hubungan antar variabel, walaupun data yang dihasilkan dapat dihubungkan dengan membangun kerangka analisis yanglogis.

Penelitian survei menghasilkan data kuantitatif yang menggambarkan secara umum keadaan sampel. Keunggulan utama dari penelitian survei adalah penelitian ini menyediakan informasi dari sejumlah banyak orang, dengan usaha yang minimal dan dana yang relatif sedikit. Survei memperbolehkan peneliti untukuntukmenelitiberbagaimacamtingkahlakudanfenomenayanglebihluas dari pada mempergunakan metodeobservasi·

Objek penelitian ini adalah pelajar SMA di yang bersekolah di Kota Malang.Populasi dibuat berdasarkan jumlah sekolah yang ada di Kota Malang. Menurutdata Dinas Pendidikan Kota Malang tahun 2015 terdapat 114 sekolah menengahumum/sederajat. SMU di Kota Malang dapat dikelompokkan menjadiempatkelompok, yaitu SMA Negeri negeri swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Negeri (MAN), dan SMA Luar Biasa bagi penyandang disabilitas.

Karena jumlah populasi banyak dan beragam, waktu dan dana penelitian yang terbatas, maka diputuskan penelitian ini mempergunakan sampel. Dengan mempergunakan sampel, data yang diperoleh akan lebih tepat dan akurat. Dana yang di pergunakan lebih hemat dan waktu penelitian lebih cepat. Dengan jumlah sekolah yang diketahui, maka sampel dalam penelitian ini termasuk ke dalam *probality samples*, artinya semua elemen populasi atau semua sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel (Nazir,1988*).*

Dengan memperhatikan jenis sekolah yang beragam, maka sampel ditentukan dengan metode *cluster random*. Dengan mengesampingkan SMA Luar Biasa, sampel di kelompokkan kedalam tiga klaster, yaitu SMA Negeri dan swasta, SMK negeri dan swasta, dan Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta. Masing-masing kluster diambil 1 secara random mempergunakan program *microsoft excel*. Dengan mengesampingkan jumlah siswa di masing-

masing sekolah yang terpilih, ditentukan secara *non proporsional* masing-masing sekolah secara random sebanyak 50 siswa dengan memperhatikan minimal 20% total jumlah siswa di masing-masing sekolah. Dengan perhitungan tersebut didapatkan jumlah sampel sebanyak 150 siswa SMA sederajat di Kota Malang.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti bekerja sama dengan tiga sekolah yang
menjadi sampel. Penentuan sampel secara acak dilakukan oleh pihak sekolah. Kuesioner di bagikan kepada 150 sampel dalam tiga sekolah, akan tetapi tidak 100 persen kuesioner yang kembali. Pada SMA Negeri 9 kuesioner yang kembali hanya 48. Pada MA Hamid Rusdi hanya 42 kuesioner, sedangkan pada SMK Telkom hanya 47 kuesioner yang kembali. Karena jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian survey yang mencari data dengan jumlah besar, maka data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan terstruktur dengan alternatif jawaban yang telah di sediakan oleh peneliti sehingga responden tinggal menjawab sesuai dengan persepsi atau pendapat pribadinya (Suyanto(ed), 2013). Kuesioner akan dibagikan kepada sampel yang telah ditentukansebelumnya.

Data yang terkumpul akan dianalisis mempergunakan analisis deskriptif, analisis korelasi, dan ANOVA. Analisis dekriptif yang akan dipergunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Data yang di peroleh berupa angka. Data tersebut diolah mempergunakan *microsoft excel* dan SPSS menjadi *output* disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Data yang terkumpul ini disajikan dalam bentuk ringkasan atau deskripsi data. Selain tabel dan grafik, data di kelompokkan ke dalam tiga kelompok ukuran yaitu, pertama mencari *central tendency* (kecenderungan terpusat), yaitu rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), dan nilai yang paling sering muncul (modus).

Analisis kedua adalah analisis korelasi. Analisis korelasi mencari hubungan antar variable. Artinya, penelitian ini akan mencari hubungan antara persepsi siswa SMU/sederajat dengan integritas mereka. Teknik korelasi yang di pergunakan adalah teknik korelasi Pearson. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara +1 s/d -1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan linier dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya jika nilai variabel pertama tinggi maka nilai variabel kedua akan tinggi pula. Jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya jika nilai variabel pertama tinggi, maka nilai variabel kedua akan rendah (dan sebaliknya).

Terdapat tiga penafsiran hasil analisis korelasi, yaitu melihat kekuatan hubungan 2 variabel, melihat signifikansi hubungan, dan melihat arah hubungan. Interpretasi kekuatan hubungan korelasi adalah jika angka koefisien korelasi menunjukkan angka 0, maka kedua variabel tidak mempunyai
hubungan.Jikaangkakoefisienkorelasimendekatiangka1,makakeduavariabel
mempunyai hubungan semakin kuat. Jika angka koefisien korelasi mendekati angka0, maka kedua variable mempunyai hubungan semakin lemah. Jika angka koefisien korelasi=1, maka kedua variable mempunyai hubungan linier sempurna positif. Jika angka koefisien korelasi = -1, maka kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurnanegatif.

Analisis ketiga adalah dengan mempergunakan ANOVA. Analisis ragam atau *analysis of variance* (ANOVA) adalah suatu metode utk menguraikan keragaman total data menjadi komponen-komponen yg mengukur berbagai sumber keragaman. ANOVA digunakan untuk menguji rata-rata lebih dari 2 sampel berbeda secara signifikan atau tidak. Dengan ANOVA dapat diambil kesimpulan apakah sampel diambil dari populasi yang memiliki rata-rata sama.

\Analisis varian menguji 2 varians (atau ragam) berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu sama.Varians pertama adalah varians antar contoh *(among samples*), varians kedua adalah varians di dalam masing2 contoh *(within samples).*Analisisvariansdgn2contohakanmemberikanhasilyangsamadengan uji t utk 2 rerata (*mean*). Dengan analisis varians ini akan menguji apakah ada perbedaan persepsi di antara keempat sekolah dan apakah ada perbedaan persepsi di dalam sekolah yang sama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan Pelajar tentang Korupsi

Korupsi memiliki makna dan pemahaman yang sangat plural. Makna korupsi yang disampaikan oleh para pakar ataupun para penggiat anti-korupsi tentu saja sangat berbeda dalam konteks pemahaman generasi muda. Genarasi muda yang dimaksud adalam makalah ini adalah siswa SMU. Bagi siswa SMU korupsi difinisikan sangat bervariasi sesuai dengan tingkat pemahaman dan penglihatan mereka.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa sebanyak 58 siswa (42%)mendefiniskan korupsi sebagai tindakan pencurian uang negara. Selanjutnya 50 siswa (37%) mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang. Sebanyak 21 siswa (15%) mengartikan korupsi sebagai tindakan pencurian biasa, sebanyak 7 orang (5%) mengartikan sebagai penipuan, dan hanya 1 siswa (1%) tidak tahu arti korupsi. Dari jawaban ini tergambar bahwa para siswa SMU di Kota Malang memiliki persepsi tentang korupsi yang sangatjelas.

Bila diperhatikan, siswa SMU/sederajat yang paling banyak mengartikan korupsi sebagai pencurian uang negara dan penyalahgunaan kewenangan. Memahami korupsi sebagai pencurian uang dan penyalahgunaan kewenangan sangat jamak ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan, korupsi sudah terlembagakan dengan rapi dengan melibatkan pihak eksekutif, legislatif, maupun yudikatif (Khaerudin, 2015). Terlembagakannya korupsi yang dilakukan lembaga trias politika dapat melemahkan lemahnya pengawasan yang dimiliki lembaga formal negara.

Selain itu dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (79%) mengetahui arti korupsi secara konseptual. Sebagaimana didefinisikan Roger Scruton korupsi berarti menggunakan jabatan publik untuk mendaptkan keuntungan pribadi, apakah itu financial atau social ,dan menyimpang dar itugas- tugas publik yang melekat pada jabatan yang diemban (Scruton, 2013). Namun, sebagian kecil responden memahami korupsi sebagai tindakan sederhana seperti pencurian dan penipuan.

Selain itu, siswa SMU Kota Malang juga memiliki pengetahuan dan pemahamanmengenaimaksuddaritindakankorupsi.Sebagianbesarresponden, yaitu sebanyak 128 responden atau 93% responden menyatakan bahwa

maksud tindakan korupsi adalah mencuri uang untuk kepentingan pribadi. Korupsi sebagai pencurian uang buat kepentingan pribadi selalu digunakan bagi pejabat yang memiliki kuasa dalam struktur pemerintahan. Para pejabat politik atau pemerintahan senantiasa memanfaat struktur kesempatan dalam memperkaya diri dari sisi financial dan ekonomi. Sementara responden yang menjawab tidakan korupsi adalah mencari uang untuk kepentingan organisasi/kelompok sebanyak 5 responden atau 4%, sedangkan sisanya tidak tahu maksud tindakan korupsi.

Selain siswa Kota Malang mengetahui mengenai korupsi, maksud dari tindakan korupsi, hal yang tidak kala pentingnya adalah parasiswa juga memiliki pengatahuan yang cukup mengenai kasus-kasus korupsi yang melihatkan para pejabat pemerintah politisi. Pengetahuan siswa Kota Malang mengenai kasus korupsi yang paling populer adalah wisma Atlet.

Sekali lagi, kasus korupsi yang paling populer di kalangan pelajar SMU di Kota Malang berturut-turut adalah kasus wisma atlet, kasus impor daging sapi, dan kasus pengadaan simulator SIM. Kepopuleran ketiga kasus tersebut karena dua hal. *Pertama*, ketiga kasus ini paling banyak mendapat sorotan media sehingga kalangan pelajar juga turut mengetahui kronologi kasus tersebut.

Walaupun sebagian besar pelajar mengetahui kronologi beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, namun terdapat 14 persen responden tidak mengetahui kronologi kasus korupsi. Jumlah ini tidak jauh berbeda dengan besaran responden yang tidak mengetahui nama pelaku tindak korupsi.*Kedua*, pelakuyangterlibatdalamketigakasusiniadalahorang-orangtopdilingkungan lembaga masing-masing. Korupsi daging infor sapi melibatkan presiden PKS. Korupsi wisma altet melibatkan bendahara partai Demokrat sekalgus mantan Putri Indonesia sekaligus istri dari bintang film. Sedangkan korupsi simulator SIM melibatkan petinggi Polri dan menggegerkan lembaga kepolisian. Korupsi Simulator SIM membuat 'gaduh' lembaga kepolisian selamaberbulan-bulan.

Aktor yang Melakukan Korupsi

Data lainya yang patut dicatat adalah bahwa korupsi melibatkan banyak aktor.Datalapanganyangberhasilkamiolahmenunjukkanketerlibatandirektur perusahaan dalam korupsi. Sedikitnyaterdapat 4 persen responden yang menjawab bahwa direktur perusahaan melakukan korupsi. Keterlibatan dalam pengusaha dalam korupsi menambah daftar panjang aktor-aktor yang terlibat dalam korupsi. Itu artinya korupsi ada dimana-mana. Sisanya sebanyak 27 responden atau 20 persen tidak mengetahui siapa yang melakukan tindakan korupsi.

Hasil tersebut memperlihatkan kedalaman keterlibatan pejabat daerah dan anggota legislatif dalam korupsi. Sebanyak 44 persen anggota DPRD dan politisi yang terlibat dalam tindak korupsi. Selain politisi dan DPRD yang terlibat korupsi, kepala daerah juga terlilit dalam korupsi di daerah. Sebanyak 14 persen kepala daerah menurut penilaian siswa sekolah Kota Malang. Temuan yang menyebutkan dalamnya keterlibatan anggota legislatif dengan kepala daerah dalam persoalan korupsi terkonfirmasi melalui penyataan:'sudah banyak anggota legislatif dan pejabat pemerintah yang ditetapkan sebagai tersangka. Figur-figur kuat seperti gubernur, anggota DPR, DPRD, baik yang

aktif maupun sudah tidak aktif sudah banyak yang terjerat dandi tetapkan sebagai tersangka' (Haboddindan Rahman.,*2013*)

Penjelasan di atas semakin meneguhkan keterlibatan para politisi maupun kepala daerah dalam korupsi. Selain itu, temuan lapangan juga menujukkan fakta baru ketika para siswa Kota Malang sangat familiar dengan wajah-wajah para koruptor.

Bila kita perhatikan persepsi mahasiswa tentang siapa aktor koruptor terpopuler,maka jawabannya adalah Angelina Sondakh, mantan Putri Indonesia. Wanita berdarah Manado dan bintang iklan Partai Demokrat ini memiliki tingkat populeritas sebanyak 75 persen. Angelina, mengalahkan Akil Mochtar yakni 40 persen. Ketidak populeran Akil, ketimbang Agelina menunjukkan bahwa siswa tidak mengetahui jabatan formal Akil, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Sejatinya, Akil lebih populer, tapi fakta berkata lain. Sedangkan pengusaha Artalita hanya mendapat 2 persen. Padahal kasus korupsi yang menjerat Artilita sangat sensasional karena melibatkan personal kejaksaan. Bahkan, ketika Artalita masuk di penjara wanita pernah membuatheboh.

Lembaga Berwenang Menindak Koruptor

Secara umum terdapat tiga lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap koruptor. Ketiga lembaga tersebut adalah KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Tiga lembaga ini bila bersinergi dengan baik, sudah tentu bias mengurangi perilaku koruptor di negeri ini. Logika ini berangkat dari pemahaman bahwa semua lembaga ini memiliki kontribusi dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

Jawaban normatif ini ternyata berbeda dengan pemahaman dan pengetahuan siswa ketika ditanya lembaga apa yang berwenang dalam menindak koruptor. Popularitas KPK sebagai lembaga yang menindak kasus korupsi disampaikan siswa di Kota Malang.. Penilaian siswa SMU terhadap KPK sangat bagus bila dibandingkan dengan kepolisian dan pengadilan. KPK mendapatkan poin 124 sebuah nilai yang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan polisi, jaksa, dan pengadilan. Itu artinya KPK juah lebih bagus kinerjanya dalam memberantas korupsi bila dibandingkan dengan kepolosian dan pengadilan. Hal ini bisa dipahami karena lembaga kepolisian maupun pengadilan juga terlibat dalam perkarakorupsi.

Wacana yang tengah berkembang dalam masyarakat juga memberikan bagaimana KPK bekerja dalam memberantas perilaku korupsi di tanah air. Kerja KPK ini tentu bersandar pada pada pasal 6 yang menyebutkan KPK berwenang melakukan pemberantasan tinfak korupsi; KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal ini memberikan ruang kepada KPK untuk banyak terlibat dalam penindakan perilaku korupsi.

Integritas Pelajar terhadap Peraturan Sekolah

Pertanyaan-pertanyaan integritas ditujukan kepda responden yang berupa siswa SMU/sederajat bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan responden terhadap aturan dan norma yang berlaku di sekitar mereka. Untuk mendapatkan ukuran mengenai integritas siswa SMA/sederajat di kota Malang pada kuesioner diturunkan menjadi 9 poin pernyataan. Berikut merupakan

pernyataan beserta hasil jawaban dariresponden.

Pernyataan pertama adalah untuk mengetahui tingkat persetujuan siswa apakah responden pernah mencontek ketika ujian. Sebanyak 16 siswa (11,6%) menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 21 siswa (15,3%) menyatakan tidak setuju. Sebanyak 30 siswa (21,9%) menyatakan cukup setuju. Sebanyak 57 siswa (41,6%) menyatakan setuju, dan sebanyak 13 siswa (9,4%) menyatakan sangat setuju.

Pernyataan berikutnya untuk mengetahui tingkat persetujuan responden apakah mereka pernah melakukan kecurangan ketika bertransaksi di kantin sekolah. Sebanyak 78 responden (57%) menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 48 responden (35)%) menyatakan tidak setuju, sebanyak 8 responden (6%) menyatakan cukup setuju, dan sisanya menyatakan setuju sebanyal 3 responden (2%).

Terhadap pernyataan apakah mereka pernah mengkopi tugas teman untuk dijadikan tugas pribadi, sebanyak 14 responden (11%) menyatakan sangat tidak setuju. Sebanyak 34 responden (24%) menyatakan tidak setuju. Sebanyak 37 responden (27%) menyatakan cukup setuju. Sebanyak 46 responden (34%) menataka setuju, dan sisanya sebanyak 6 responden (4%) menyatakan setuju.

Pernyataan yang diajukan berikutnya kepada responden adalah mengenai membolos sekolah. Diagram 5.17 di bawah ini memperlihatkan hasil 71 responden (52%) sangat tidak setuju dengan pernyataan pernah membolos. Sebanyak 30 responden (22%) menyatakan tidak setuju, 15 responden (11%) menyatakan cukup setuju, 16 responden (11%) menyatakan setuju. Sisanya sebanyak 5 responden (3%) menyatakan sangat setuju.

Merokok adalah tindakan yang dilarang bagi siswa sekolah karena mereka masihdibawahumur. Pernyataan selanjutnya yang ditujukan kepada responden terkait dengan merokok. Sebanyak 78 siswa (57%) menyatakan sangat tidak setuju pernah merokok. Sebanyak 28 siswa (20%) menyatakan tidak setuju, 13 siswa (10%) cukup setuju, 16 siswa (12%) setuju pernah merokok, dan sisanya sebanyak 2 siswa (1%) sangat setuju pernahmerokok.

Tindakan lain yang juga dilarang bagi siswa adalah meminum minuman keras. Diagram di bawah ini menunjukkan pernyataan responden tentang meminum minuman keras. Sebanyak 94 responden (69%) menyatakan sangat tidak setuju pernah meminum minuman keras. Sebanyak 33 responden (24%) menyatakan tidak setuju. Sebanyak 8 responden (6%) cukup setuju pernah meminum minuman keras, 1 responden (0,5%) menyatakan setuju, dan 1 responden (0,5%) menyatakan sangat setuju.

Selain tindakan merokok dan minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba juga termasuk dilarang karena melanggar hukum. Diagram dibawah ini menggambarkan pernyataan responden tentang konsumsi narkoba. Sebanyak 108 responden (79%) menyatakan sangat tidak setuju pernah mengkonsumsi narkoba. Sebanyak 28 responden (20,5%) tidak setuju pernah mengkonsumsi narkoba dan 1 responden (0,5%) setuju pernah mengkonsumi narkoba.

Berikutnya adalah pernyataan tentang membohongi guru. Sebanyak 39 responden (28,5%) menyatakan sangat tidak setuju pernah membohongi guru. Sebanyak 42 responden (31%) menyatakan tidak setuju. Sebanyak 39 responden (28,5%) menyatakan cukup setuju, 14 responden setuju (10%), dan 3 responden (2%) sangat setuju pernah membohongi guru.

Selain kepada guru, kejujuran terhadap orang tua juga ditanyakan. Diagram 5.22 di bawah ini meunjukkan pernyataan responden terhadap membohongi uran tua terkait iuran sekolah. Sebanyak 83 responden (61%) menyatakan sangat tidak setuju dan 30 responden (22%)menyatakan tidak setuju pernah membohongi orang tua terkait iuran sekolah. Sebanyak 16 responden (11,5%) cukup setuju, 7 responden setuju (5%), dan 1 responden (0,5%) sangat setuju pernah membohongi orang tua terkait iuransekolah.

Relasi Korupsi dengan Integritas

Jumlah pernyataan yang disampaikan untuk mengukur integritas responden sebanyak 9 pernyataan. Pernyataan disampaikan kedalam kalimat positif pernah melakukan tindakan negatif yang diyakini melanggar integritas responden, yaitu siswa SMU/sederajat. Jawaban responden dikategorikan ke dalam 5 tingkat jawaban melalui skala *likert*, yaitu sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), cukup setuju (3), setuju (4), dan sangat tidak setuju (5). Melalui pilihan jawaban ini dapat diketahui bahwa semakin kecil skor responden maka semakin tinggi tingkat integritasnya. Skor untuk integritas tertinggi adalah 9. Skor untuk integritas terendah adalah 45.

Dari skor integritas di atas, tingkat integritas dikatagorikan menjadi tiga katagori mempergunakan standar deviasi dan nilai tengah (median). Dari perhitungan yang dilakukan di ketahui bahwa standar deviasi skor integritas yang didapatkan adalah 10,824. Nilai tengah (median) yang didapatkan adalah 27. Katagori integritas tinggi diperoleh dengan rumus median-(1+standar deviasi). Katagori integritas rendah diperolehdengan rumus median+(1+standar deviasi). Kategori sedang berada di antara katagori tinggi dan rendah. Berikut ini merupakan gambar kurva penentuan kategori integritas siswa SMU/sederajat di Kota Malang.

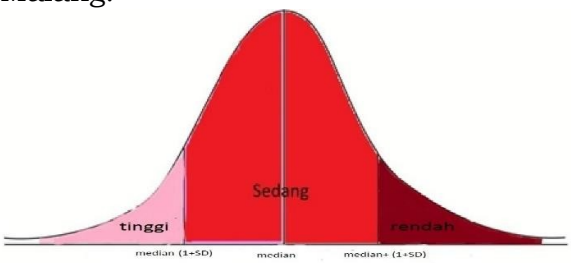

Gambar 1 Kurva katagori integritas siswa SMU/sederajat di Kota Malang
Sumber: diolah peneliti, 2015

Skor integritas tertinggi dari responden adalah 9 dan skor integritas terendah dari responden adalah 36. Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat dua katagori integritas siswa, yaitu siswa dengan integritas tinggi dan siswa dengan integritas sedang. Berikut ini tabel yang menggambarkan katagori integritas siswa.

Tabel 1 Integritas Siswa

Katagori integritas	Frekuensi	Prosentase
Integritas tinggi	46	33,6%
Integritas sedang	91	66,4%
Jumlah	137	100%

Sumber: diolah peneliti, 2015

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar (66,4%) siswa SMU di Kota Malang memiliki integritas sedang. Sisanya sebesar 33,6% memiliki integritas tinggi. Tidak ada siswa yang memiliki integritas rendah. Rata-rata siswa SMU di Kota Malang berintegritas sedang dengan skor 18.

Relasi Pemahaman Korupsi dengan Integritas

Untuk melihat hubungan antara persepsi siswa tentang korupsi dengan nilai integritas dipergunakan analisis korelasi. Dengan mempergunakan level signifikansi 0,1 diperoleh hasil bahwa persepsi siswa tentang korupsi memiliki hubungan yang signifikan dengan integritas siswa. Berikut ini merupakan uraiannya.

Pemahaman siswa SMU/sederajat di Kota Malang mengenai maksud tindakan korupsi memiliki hubungan signifikan dengan integritas mereka. Koefisien korelasi sebesar 0,258 menunjukkan hubungan antara keduanya cukup kuat. Koefisien yang positif menunjukkan arah hubungan yang searah. Semakin paham siswa terhadap korupsi, semakin tinggi tingkat integritasnya. Hal ini membuktikan bahwa semakin paham siswa tentang korupsi maka semakin taat siswa terhadap aturan-aturan yang mengatur disekitarnya.

Sebagian besar responden, yaitu 86% siswa mengetahui nama-nama koruptor. Koefisien korelasi sebesar 0,171 menunjukkan hubungan antara keduanya lemah. Walaupun demikian, pengetahuan mereka terhadap koruptor ini memiliki hubungan signifikan dengan integritas siswa. Koefisien yang positif menunjukkan arah hubungan yang searah. Artinya, siswa menjadikan kasus-kasus yang menjerat para koruptor tersebut sebagai peringatan agar mereka jujur dan taat terhadap aturan-aturan , seperti tidak membohongi guru, tidak merokok, tidak memplagiat tugas teman, dan lain sebagainya. Sebesar 86% peserta paham bahwa penyalahgunaan wewenang/kekuasaan merupakan tindakan korupsi. Pemahaman ini juga berhubungan signifikan terhadap integritas siswa. Koefisien korelasinya sebesar -0,113. Koefisien yang negatif menunjukkan arah yang terbalik. Semakin tinggi pemahaman siswa bahwa penyalahgunaan wewenang/kekuasaan merupakan tindakan korupsi, maka semakin rendah tingkat integritas siswa.

Disparitas Nilai Integritas

Dengan mempergunakan analisis of varian, dapat diketahui perbedaan rata-rata nilai integritas antar sekolah yang menjadi target responden dalam penelitian ini. Bila dibuat nilai rata-rata integritas disemua sekolah yangmnejadi responden dalam penelitian, maka bisa di tabelkan sebagaimana tertera dalam tabel 5.2. untuk lebih jelasnya bisadibaca.

Tabel 2 Rata-rata Nilai Integritas Tiap Sekolah

Nama Sekolah	Rata-Rata
SMUN 9 Malang	19,13
MA Hamid Rusdi	18,05
SMK Telkom	16,81
Rata-rata	18

Sumber: diolah peneliti, 2015

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata nilai integritas siswa SMUN 9 Malang adalah 19,13. Rata-rata nilai integritas siswa MA Hamid Rusdi adalah 19,13. Rata-rata nilai integritas siswa SMK Telkom adalah 16,81. Dengan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai integritas SMK Telkom adalah yang paling tinggi, walaupun demikian ketiganya masih berada pada tingkat integritas sedang.

ANOVA adalah analisis untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai integritas antara siswa SMUN 9 Malang, MAHamid Rusdi, dan SMK Telkom. Dari analisis yang telah dilakukan diperoleh F hitung sebesar 2,395 dan signifikansi 0,095. F tabel yang didapatkan pada bab III adalah 2,34. Karena F hitung > F tabel maka Ho ditolak Level signifikansi < 0,1 maka Ho ditolak. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata integritas siswa SMUN 9 Malang, MA Hamid Rusdi, SMK Telkom adalah tidaksama**.**

PENUTUP

Dari seluruh narasi yang sudah dijelaskan tersebut, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan. Pertama, pelajar di Kota Malang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perilaku korupsi. Data yang ditampilkan menunjukkan pemahaman pelajar tersebut. Bagi pelajar di Kota Malang, korupsi dimaknai sebagai penyelewangan kekuasaan dan pengambilan uang negara untuk memperkaya diri. Pemahaman ini memperlihatkan bahwa siswa Kota Malang memeliki pengatahun tentang korupsi.

Kedua, pelajar di Kota Malang, sangat tahu figur-figur yang yang terlibat korupsi sekaligus kasus yang melibatkan figur tersebut. Pengetahuan ini mereka peroleh melalui pembacaan koran dan menonton acara televisi. Terakhir, pelajar Kota Malang memiliki pengatahuan bahwa tentang lembaga-lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan korupsi. Menurutnya, lembaga KPK merupakan lembaga yang bisa diandalkan dalam pemberantasan korupsi. Pemahaman ini merupakan jawaban bagus dan baik karena memang faktanya seperti itu. KPK jauh lebih kuat dan kokoh bila melakukan penindakan korupsi, bila di bandingkan kejaksaan dan kepolisian.

Ketiga, kondisi pelajar di Kota Malang menunjukkan bahwa pemahaman pelajar mengenai korupsi berhubungan dengan ketaatan pelajar terhadap peraturan sekolahnya. Semakin paham pelajar terhadap korupsi, semakin taat pula mereka terhadap peraturan-peraturan sekolah.

REFERENSI

Dwiyanto, Agus dkk. (2003). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jogjakarta: PSKK-UGM.

Haboddin, Muhtar dan Rahman, Fathur. (2013). *Gurita Korupsi Pemerintahan Daerah*. Jogjakarta, Kaukaba.

Harrisan, Lisa. (2007). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.

Lauer, Robert H. (2003). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marczyk, DeMatteo, Festinger. (2005). *Essential of Research Design and Methodology*. New Jersey: John Wiley & Sons,Inc.

Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Onghokham. (2002). *Dari Soal Priyayi Sampai Nyi Blorong. J*akarta: Kompas.

Putra, Heddy Shri Ahimsa, 'Korupsi di Indonesia: Budaya atau Politik

Makna'. Jogjakarta: *WACANA*, XIV/2003.
Saldi Isra, 'Korupsi dan Desentralisasi Korupsi' Makalah yang disampaikan pada tanggal 26 Oktober 2008.
Scruton, Roger. (2013). *Kamus Politik*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
Sirimorok, Nurhadi. (2010). *Membangun Kesadaran Kritis*. Jogjakarta: INSIST.
Suyanto, Bagong (ed). (2013). *Metode Penelitian Sosial* , *Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta, Kencana Prenanda Media Grup.
Widjoyanto, Bambang dkk. (2010). *Koruptor Itu Kafir*. Bandung: Mizan.

Koran
Kompas, 3 Maret 2013
Kompas,15 Mei 2015
Khaerudin 'Sepenggal Cerita dari Sumut' *Kompas, 12 November 2015*